



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Perubahan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Oleh:

Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH, M.AP
Direktur SUPD III

Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri



<https://konvergensi.bangda.kemendagri.go.id>



LATAR BELAKANG

Tingkat Kemiskinan Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang dan **menunjukkan tren penurunan tiga tahun beruntun**

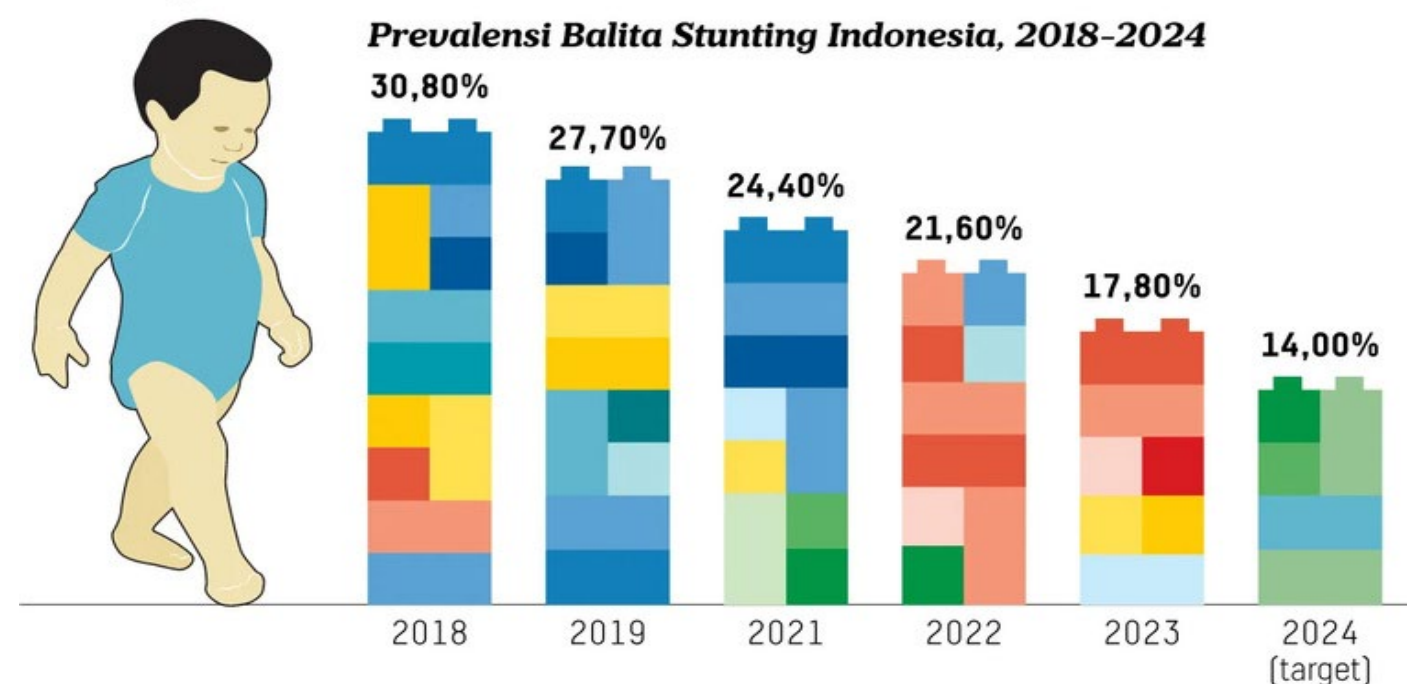


Keterangan:

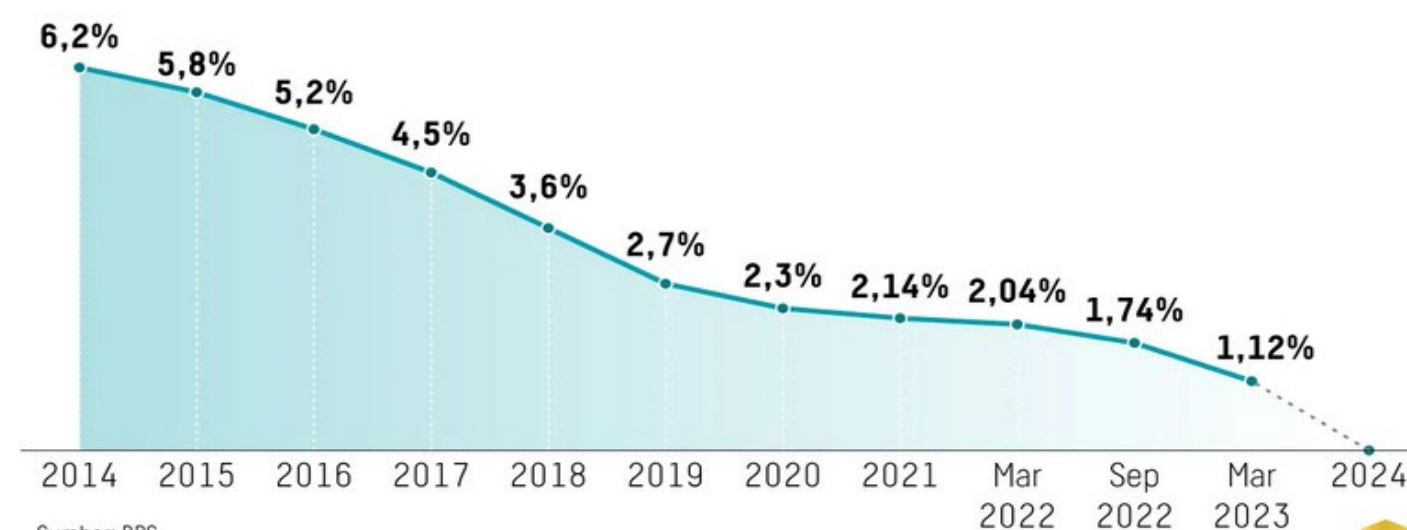
- Angka kemiskinan periode Maret 2014-Maret 2024
- Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam sepuluh tahun terakhir
- Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun
- Tahun 2020 dan 2021, angka kemiskinan tinggi karena Pandemi Covid-19

Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Stunting dan Kemiskinan

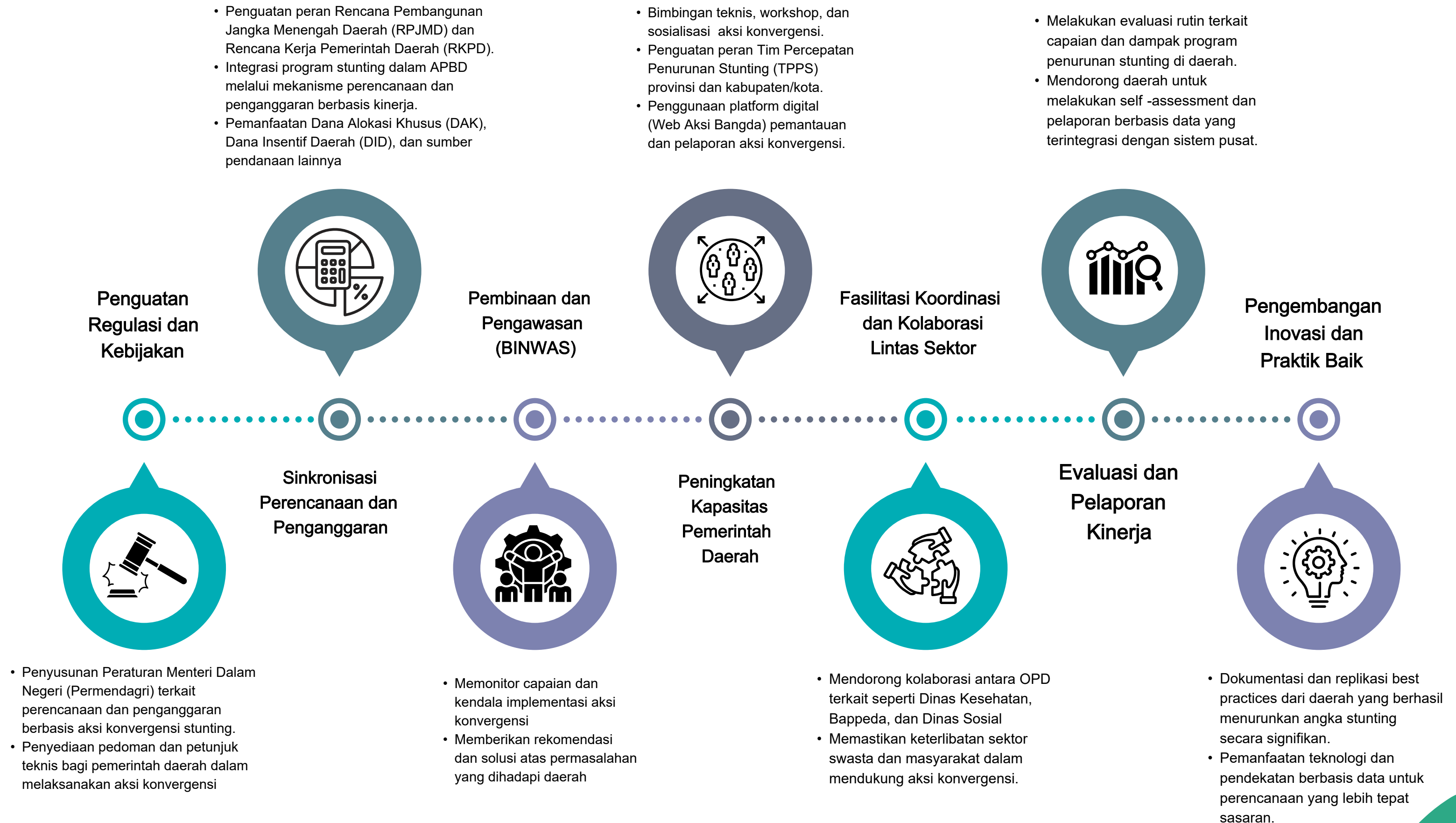


Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Indonesia, 2014-2023



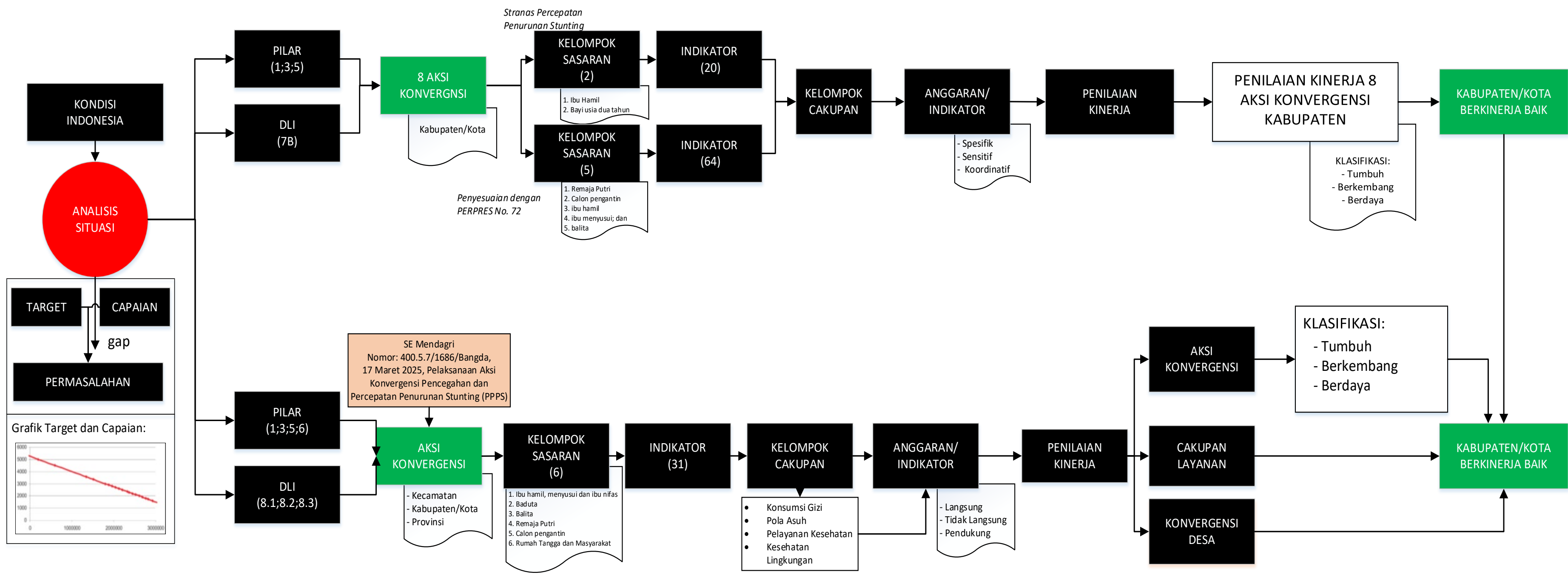
Sumber: BPS

Peran Kemendagri dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui Aksi Konvergensi



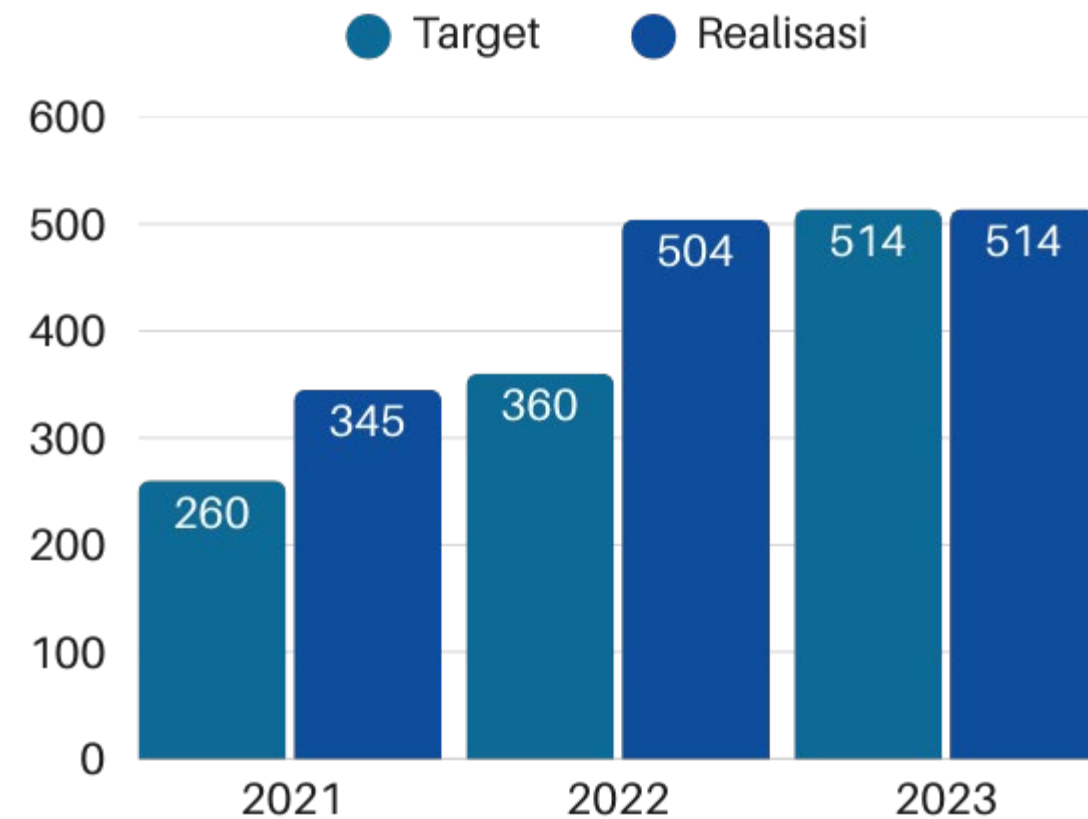
SKEMA ALUR PIKIR

Keberlanjutan dan Transformasi Program Aksi Konvergensi: Mengoptimalkan Pembelajaran dari 8 aksi konvergensi untuk Implementasi Aksi Konvergensi

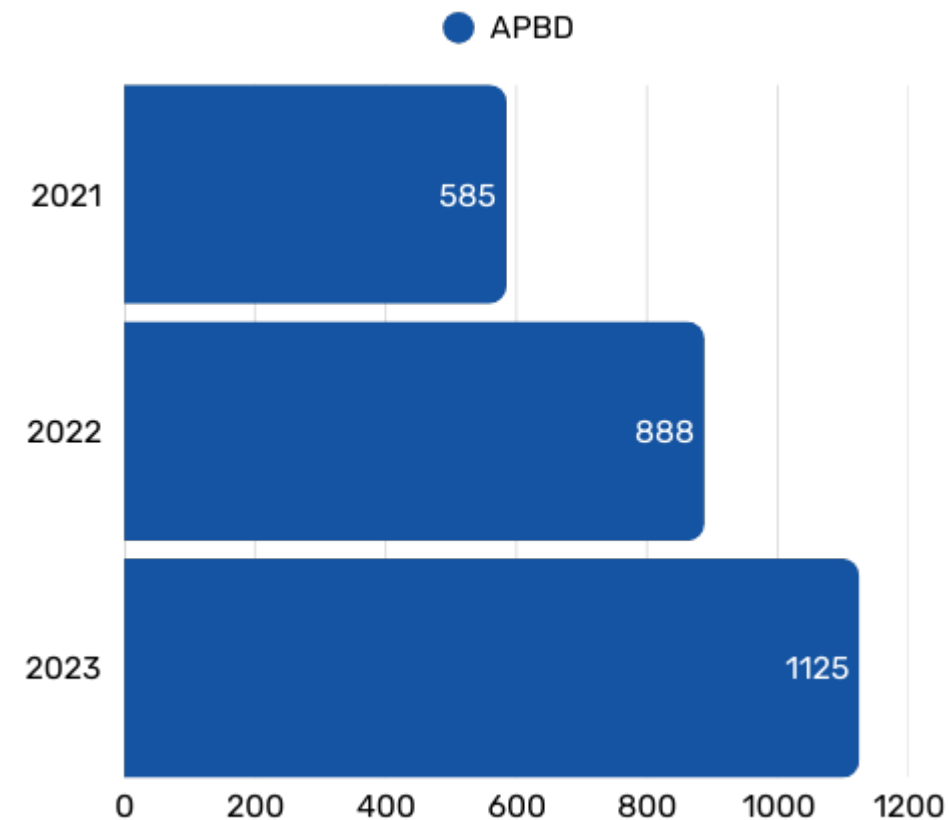


Capaian hasil pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi

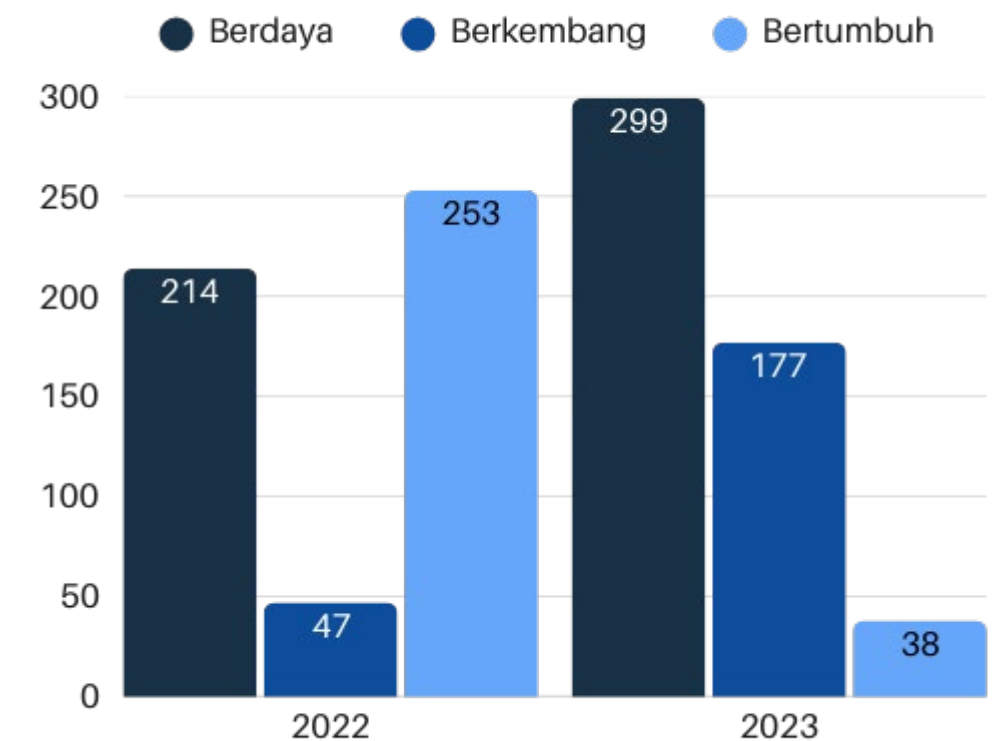
JUMLAH KABUPATEN/KOTA LOKUS STUNTING YANG MELAKSANAKAN 8 AKSI KONVERGENSI



TOTAL ANGGARAN STUNTING (APBD) KABUPATEN/KOTA PER PROVINSI 2021 -2023



JUMLAH KABUPATEN/KOTA HASIL DARI PENDAMPINGAN TEKNIS DENGAN KLASIFIKASI BERDAYA PADA 2022 -2023



Pada tahun 2021, hanya 345 kabupaten/kota yang aktif berpartisipasi dalam aksi konvergensi, sekitar 67% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Namun, dengan pembinaan dan pengawasan yang intensif, pada tahun 2024 seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam aksi konvergensi.



meningkat sebesar

94%

Terkait hal ini, kinerja kabupaten/kota cenderung meningkat.

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

(Perpres 72 Tahun 2021)

5 PILAR



Peningkatan Komitmen dan visi kepemimpinan di k/l, pemprov, pemda kab/kota, dan pemdes.



Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.



Peningkatan konvergensi, intervensi spesifik dan sensitive di k/l, pemprov, pemda kab/kota, dan pemdes.



Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.



Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi riset, dan inovasi



Kemendagri menerapkan 8 aksi konvergensi sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan pemda dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dan berkelanjutan agar intervensi layanan bagi setiap sasaran prioritas stunting dapat berkualitas dan efektif dalam menurunkan angka stunting

OUTPUT



PENINGKATAN DUKUNGAN ANGGARAN DAERAH DAN DESA



ADANYA REGULASI DAERAH YANG RELEVAN



ADANYA REPENINGKATAN SISTEM DATA, PUBLIKASI DAN PELAPORANGULASI DAERAH YANG RELEVAN



PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN SPESIFIK DAN SENSITIF



PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN SPESIFIK Peningkatan cakupan intervensi bagi setiap sasaran prioritas dan sensitif

APBD
RKPD
RPJMD

PERUBAHAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

(Draft Revisi Perpres 72 Tahun 2021)

6 PILAR



komitmen politik pemimpin di tingkat pusat dan daerah



Komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat



Konvergensi program dan kemitraan



Ketahanan pangan dan gizi



Peningkatan Kapasitas pelaksana program



Pemantauan dan evaluasi



Transformasi Aksi Konvergensi mengacu pada perubahan strategis dalam pendekatan pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam intervensi lintas sektor guna mencapai target nasional dalam menurunkan prevalensi stunting.

APBD
RKPD
RPJMD

OUTPUT



EVALUASI DUKUNGAN ANGGARAN DAERAH DAN DESA



ADANYA REGULASI DAERAH YANG RELEVAN



ADANYA REPENINGKATAN SISTEM DATA, PUBLIKASI DAN PELAPORANGULASI DAERAH YANG RELEVAN



PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN PPFS



PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN CARUPAN INTERVENSI BAGI SETIAP SASARAN PRIORITAS DAN SENSITIF

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun strategi akselerasi pencapaian target penurunan stunting tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri mencatat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:



Intervensi layanan yang belum fokus pada sasaran prioritas ;



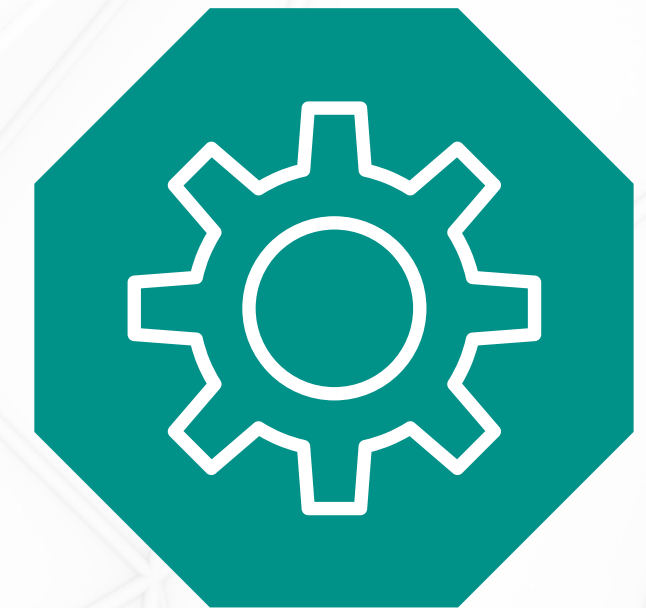
Validitas data dukungan anggaran daerah tematik stunting;



Komitmen pimpinan daerah belum masif terutama di tingkat desa/kelurahan



Kinerja baik pemerintah daerah dalam konvergensi belum relevan dengan pencapaian target penurunan stunting



Peran dan kapasitas tpps dalam melakukan koordinasi dan konvergensi intervensi layanan belum optimal

Transformasi Aksi



8 Aksi Konvergensi

1. Membangun Sistem Koordinasi Dan Pendampingan Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting
2. Memastikan Implementasi 8 Aksi Konvergensi Di Kabupaten/Kota
3. Memfasilitasi Penandaan Dan Pemantauan Anggaran Daerah Terkait Program Stunting Tingkat Kabupaten/Kota
4. Mengembangkan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaksanaan Program Stunting
5. Melaksanakan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Percepatan Penurunan Stunting



Aksi Konvergensi

1. Memfasilitasi Penguatan Peran Kecamatan, Desa, Kelurahan, Swasta Dan Masyarakat Dalam Ppps
2. Memfasilitasi Penyelarasan Pelaksanaan Penandaan (Taging) Dan Penelusuran (Tracking) Apbd Prov Dan Kab/Kota Dalam PPPS
3. Memfasilitasi Penguatan Analisis Situasi (Ansit) Dalam Sistim Perencanaan Pelaksanaan Dan Monev Ppps Di Kabupaten/Kota Dan Provinsi
4. Peningkatan Kapasitas SDM Di Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi Dalam Ppps Berbasis Transformasi Digital Yang Terintegrasi Dalam Web Aksi Bangda Dengan Sistim Kependudukan (Dukcapil) Dan Sipd (Ditjen Bangda, Keuda Dan Pusdatin) Serta Data Spasial Pemerintahan (Big/Ditjen Adwil)
5. Memfasilitasi Penguatan Regulasi Dan Publikasi Di Daerah Dalam PPPS
6. Memfasilitasi Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Provinsi Yang Berkinerja Baik Dalam PPPS

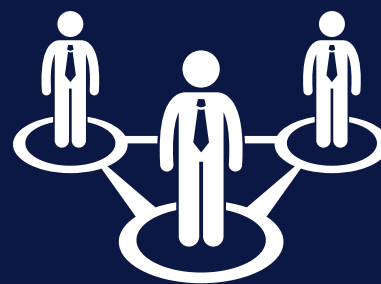
STRATEGI

Dengan beberapa capaian dan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menghadapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, perbaikan berikut perlu dilakukan:

Transformasi Digital Aksi Konvergensi



Refocusing Kelompok Sasaran dan Pemangku Kepentingan



Penguatan Peran Kecamatan



Pengembangan Aplikasi WebAksiBangda Terintegrasi

Alur Integrasi



JUKNIS DAN PEDOMAN 2025



Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting adalah panduan yang dirancang untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan aksi konvergensi berjalan sesuai standar dan target nasional. Pedoman ini mencakup strategi pembinaan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, serta mekanisme pengawasan untuk memantau kepatuhan dan efektivitas intervensi yang dilakukan. Dengan pedoman ini, pemerintah provinsi diharapkan dapat mengarahkan dan mendukung kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan dan kegiatan yang terintegrasi.

Pedoman Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting merupakan panduan yang dirancang untuk mengukur efektivitas pelaksanaan delapan aksi konvergensi di tingkat daerah. Pedoman ini menyediakan indikator dan mekanisme penilaian yang komprehensif, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari intervensi yang dilakukan. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola program melalui umpan balik yang konstruktif, sehingga pemerintah daerah dapat terus memperbaiki strategi dan meningkatkan capaian dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

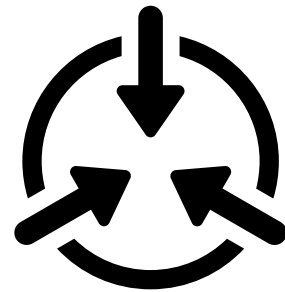


Pedoman Penandaan dan Pelacakan Anggaran Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting merupakan dokumen panduan yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menandai, dan melacak alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Pedoman ini memberikan metode sistematis untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan efektif juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sekaligus memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengevaluasi efisiensi penggunaan dana dalam rangka percepatan penurunan stunting sesuai dengan prioritas nasional.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pemerintah Daerah dalam Upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting berisi tentang panduan operasional yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan aksi konvergensi secara efektif dan terkoordinasi. Juknis ini memuat langkah-langkah strategis mulai dari analisis situasi, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi berbasis data. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran, terukur, sebagaimana diatur dalam kebijakan percepatan penurunan stunting, termasuk pengintegrasian program melalui kolaborasi lintas sektor.

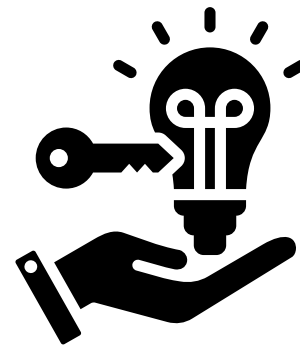


Inovasi Penanganan Stunting



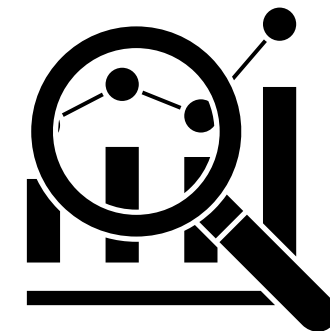
Penguatan Aksi Konvergensi Program

- **Integrasi Data:** Sinkronisasi data stunting tingkat pusat dan daerah melalui dashboard WebAksibangda.
- **Penyelarasan Kebijakan dan Program :** Memastikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu pada aksi konvergensi.
- **Penguatan Peran Kecamatan:** Mengoptimalkan peran kecamatan untuk mendukung kegiatan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.



Pengembangan Knowledge Management & E -Learning

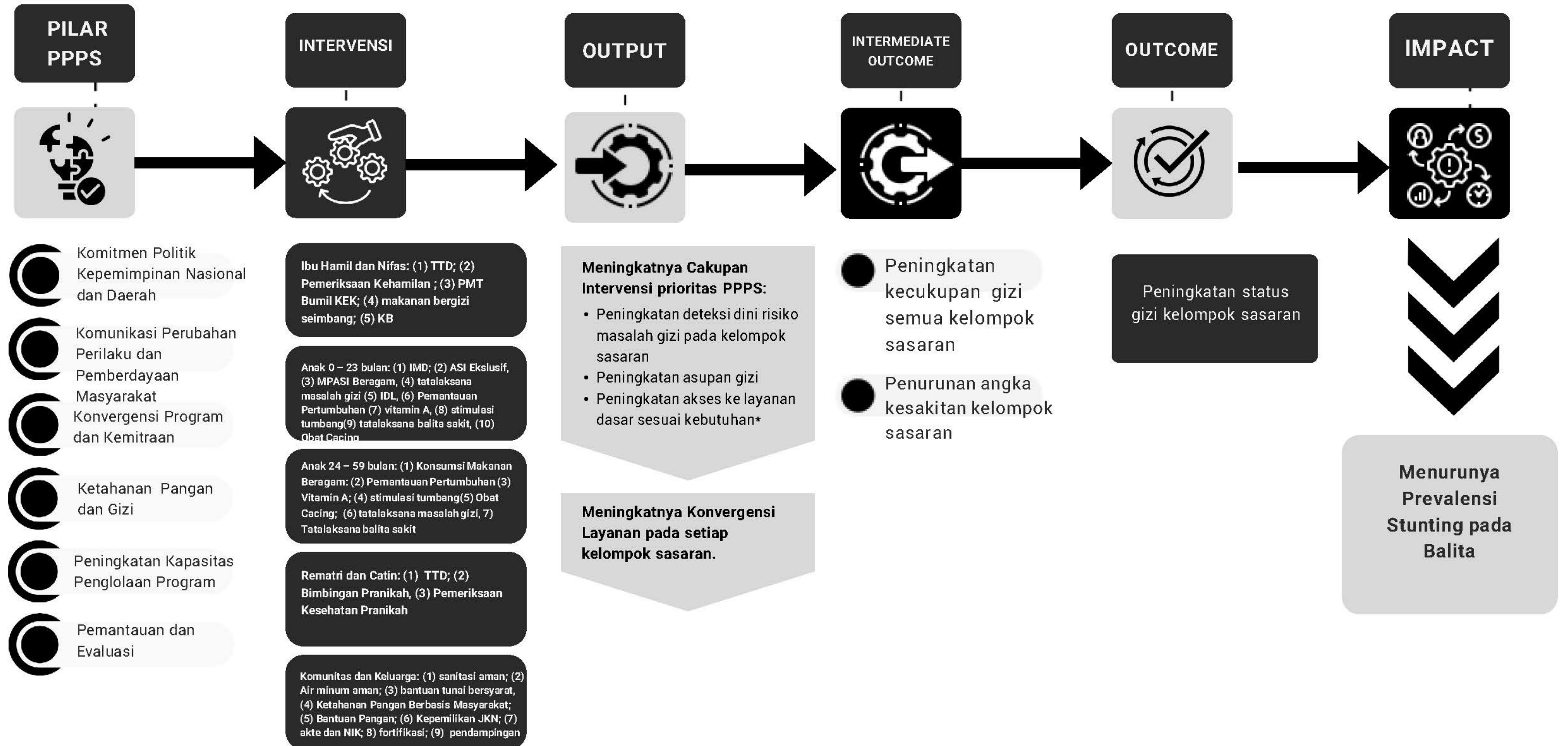
- **Portal Digital Pelatihan:** Memberikan pelatihan daring untuk peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah.
- **Dokumentasi Praktik Baik :** Menyediakan basis data intervensi stunting yang telah berhasil diterapkan di berbagai daerah untuk menjadi referensi kebijakan.



Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Teknologi

- **Mengembangkan aplikasi** yang terintegrasi dengan SIPD, GIS Dukcapil dan Adwil untuk memonitor capaian aksi konvergensi secara real -time .
- **Sistem penghargaan berbasis kinerja daerah** dalam menurunkan prevalensi stunting

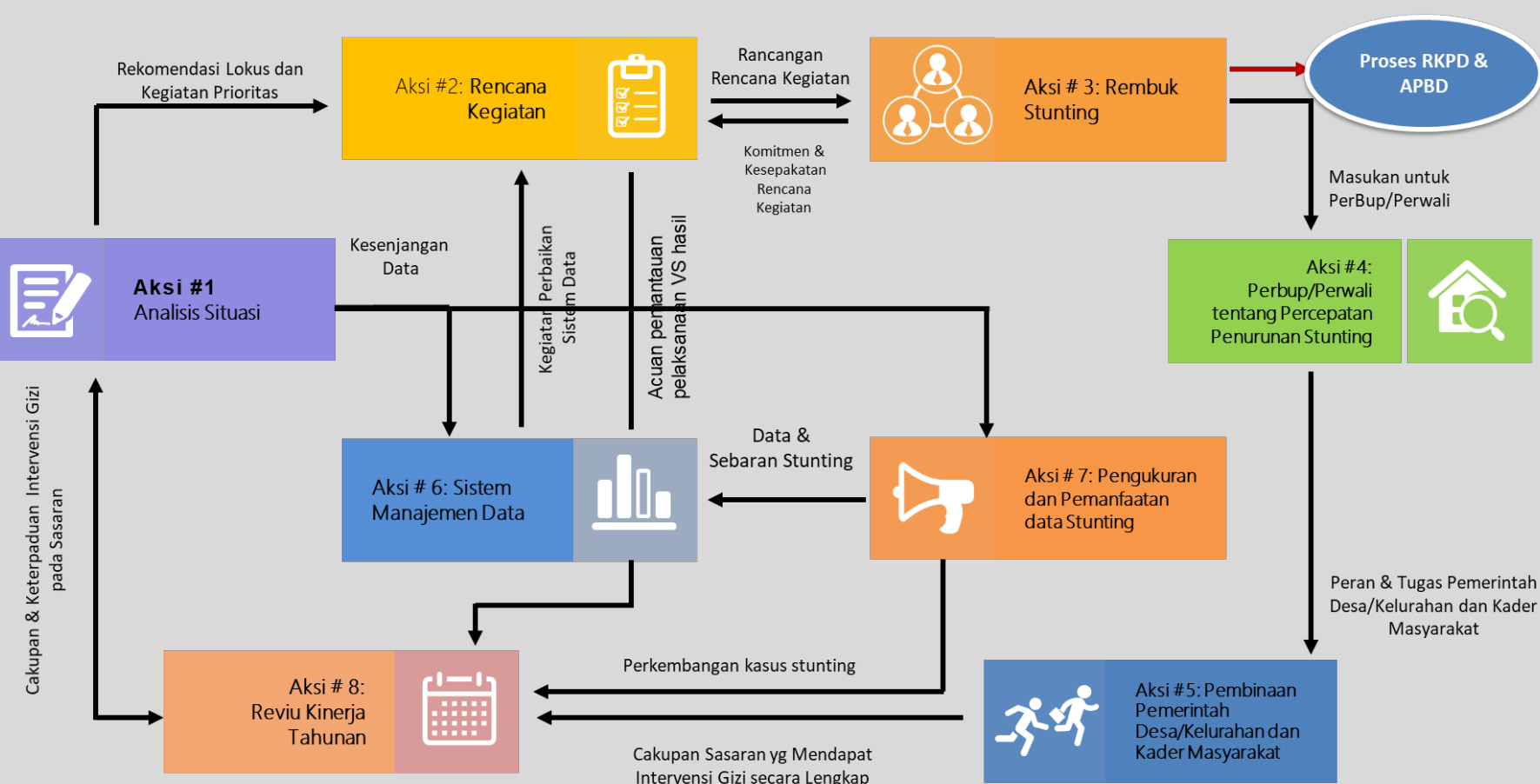
KONSEP DESAIN LOGICAL FRAME WORK STRANAS PPPS TAHUN 2025 - 2029





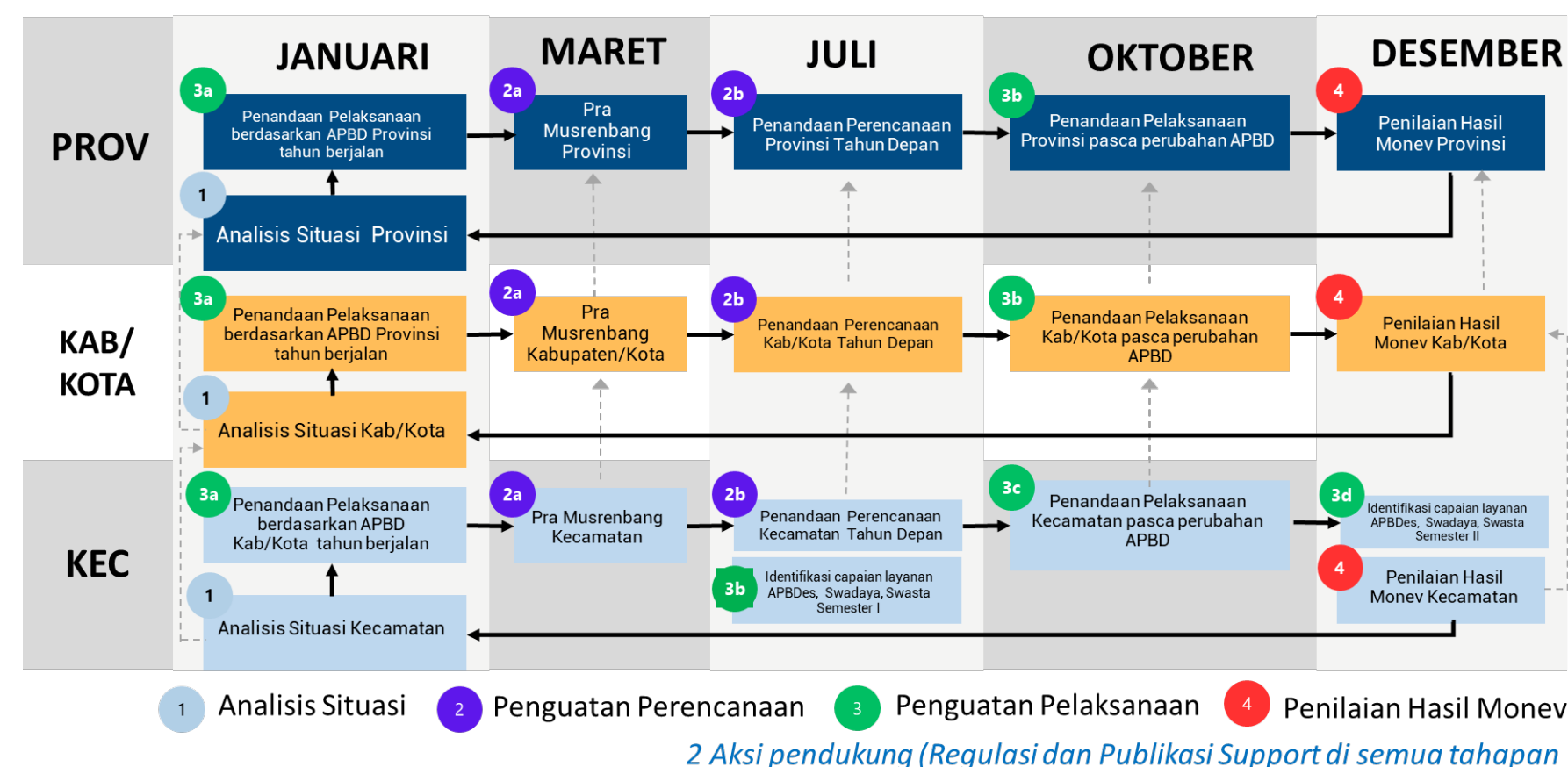
TRANSFORMASI AKSI KONVERGENSI

SIKLUS 8 AKSI KONVERGENSI PERRCEPATAN PENURUNAN STUNTING



BEFORE

SIKLUS AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



AFTER

INDIKATOR INTERVENSI KONVERGENSI DAERAH



IBU HAMIL, IBU NIFAS & IBU MENYUSUI	BADUTA USIA 0 – 23 BULAN	BALITA USIA 24 – 59 BULAN	REMAJA PUTRI	CALON PENGANTIN	RUMAH TANGGA & MASYARAKAT
1. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK; 2. Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan; 3. Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil; 4. Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan; 5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	1. Praktik Inisiasi Menyusui Dini; 2. Anak usia 0-5 bulan mendapatkan ASI Eksklusif; 3. Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam; 4. Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI; 5. Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tatalaksana gizi buruk; 6. Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan; 7. Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; 8. Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap; 9. Anak usia 0-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar; 10. Anak usia 0-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM).	1. Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tatalaksana gizi buruk; 2. Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan; 3. Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; 4. Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar; 5. Jumlah temuan kasus pneumonia pada anak usia 24-59 bulan; 6. Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat obat cacing (POPM).	1. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) terhadap Remaja Putri 2. Skrining anemia terhadap Remaja Putri	1. Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan; 2. Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	1. Rumah tangga mendapatkan akses terhadap Air Minum Aman; 2. Rumah tangga mendapatkan akses terhadap Sanitasi Aman; 3. Penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 4. Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK); 5. Anak mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA); 6. Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



<https://konvergensi.bangda.kemendagri.go.id>

